

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12, 2019).

Otonomi Daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Adapun tujuan pemberian wewenang atau otonomi daerah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik, kehidupan demokrasi berkembang, mewujudkan keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah dalam NKRI, serta meningkatkan peran serta masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22, 1999).

Termasuk di dalamnya kemampuan keuangan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengukuran kinerja pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta akuntabilitas, yang digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan kegiatan pemerintah. Dengan demikian, hasil dari langkah-langkah tersebut dapat menunjukkan seberapa baik visi dan misi Pemerintah saat ini telah tercapai.

Salah satu cara untuk menilai kinerja pemerintah adalah dengan melakukan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mempengaruhi kemajuan daerah. Cara untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan adalah dengan menganalisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah diidentifikasi dan dilaksanakan.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan (Saragih et al., 2020).

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai indikator keuangan dan non-keuangan dari pekerjaan yang dilakukan atau hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, proses atau unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan salah satu bentuk akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi prinsip yang harus diikuti, data pengukuran kinerja dapat menjadi perbaikan pada periode selanjutnya.

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan sebagai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari situasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Kemampuan daerah untuk menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh daerah berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga Pemerintah Daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada dukungan keuangan dari Pemerintah Pusat. Tingkat investasi (pembangunan) yang tinggi memberikan gambaran tentang infrastruktur dan fasilitas yang akan dibangun. Pada umumnya apabila tingkat pembangunan tinggi, maka akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat tersebut. Hal ini membuktikan, semakin banyak Belanja Modal yang digunakan maka kemampuan dalam mengukur kinerja keuangan mengalami peningkatan (Saragih et al., 2020).

Sesuai dengan tujuan analisis rasio keuangan, terdapat beberapa indikator keberhasilan kinerja keuangan pengelolaan keuangan daerah. Indikator efektif keberhasilan pengelolaan keuangan adalah keberhasilan Pertumbuhan Ekonomi. Pemerintah menyampaikan arah Kebijakan bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan pemerataan

ditunjukkan melalui penciptaan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, 2019).

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perekonomian pada cakupan area nasional maupun daerah ialah pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan secara fisik terhadap produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara. Peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang modal dan bertambahnya sektor jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan ekonomi dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Kegiatan Pertumbuhan ekonomi yang dilihat melalui kegiatan tersebut adalah kegiatan perekonomian yang mampu menghasilkan *output* yang bertambah secara agregat atau melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto. Sehingga dalam mengukur laju pertumbuhan ekonomi untuk skala nasional yaitu presentase perubahan Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan untuk skala Provinsi, Kabupaten/Kota menggunakan presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pembangunan daerah yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di segala bidang bersama masyarakat, tak terkecuali bidang ekonomi yang semakin membaik seiring dengan dinamika

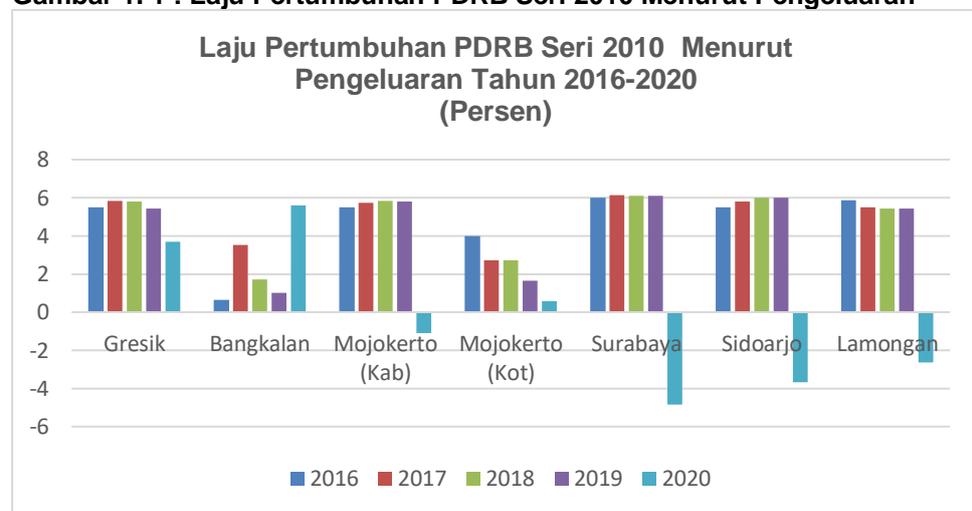
pembangunan itu sendiri (RKPD Jatim, 2021). Hasil yang telah dicapai dari pembangunan tersebut, secara ekonomi makro dapat dilihat melalui meningkatnya besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Pengeluaran. Perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan Pengeluaran dikelompokkan menjadi 6 komponen yaitu: 1). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, 2). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, 3). Pembentukan Modal Tetap Domestik, 4). Perubahan Inventori, 5). Ekspor Barang dan Jasa, dan 6). Impor Barang dan Jasa (Zaenal Arifin, 2000).

Penelitian ini fokus pada daerah di wilayah Gerbangkertosusila. Gerbangkertosusila merupakan gabungan dari beberapa Kabupaten/Kota tertentu di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang daerahnya saling berhimpitan wilayahnya. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan dengan pusat di Kota Surabaya. Wilayah Gerbangkertosusila merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kawasan Gerbangkertosusila yang merupakan aglomerasi industri di daerah Jawa Timur dan kemudian terciptanya suatu kesinambungan kemudian menjadi pendorong dalam kegiatan perekonomian. Perlambatan laju pertumbuhan PDRB tersebut tentunya akan berdampak terhadap Pendapatan Daerah di wilayah tersebut.

Sektor yang berperan dalam pembentukan PDRB di wilayah Gerbangkertosusila menghasilkan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur. Tingginya pertumbuhan ekonomi di

wilayah Gerbangkertosusila menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Selain menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, wilayah Gerbangkertosusila juga sebagai wilayah penggerak dan sekaligus *contributor* pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah wilayah masing-masing kabupaten dan kota tersebut.

**Gambar 1. 1 : Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran**



**Sumber: BPS Jawa Timur (2022)**

Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan PDRB di wilayah Gerbangkertosusila mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, 2006).

Dalam era otonomi daerah, kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah semakin luas dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri tentu memberikan peluang bagi daerah tersebut untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengoptimalkan potensi daerah agar meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik.

Untuk mengetahui peran Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi masing-masing daerah kabupaten dan kota di wilayah tersebut, maka menarik untuk diambil suatu kajian dan menganalisisnya. Variabel penelitian ini berasal dari keuangan daerah, yaitu Kinerja Keuangan Daerah di wilayah Gerbangkertosusila. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan sedangkan Pertumbuhan Ekonomi pada penelitian ini diukur dengan tingkat PDRB Pengeluaran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI KASUS GERBANGKERTOSUSILA TAHUN 2016--2020)”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, berikut ini rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Rasio Kemandirian di wilayah Gerbangkertosusila berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

2. Apakah Rasio Efektivitas di wilayah Gerbangkertosusila berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
3. Apakah Rasio Efisiensi di wilayah Gerbangkertosusila berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
4. Apakah Rasio Pertumbuhan di wilayah Gerbangkertosusila berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
5. Apakah Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan di wilayah Gerbangkertosusila secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Gerbangkertosusila.
2. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Gerbangkertosusila.
3. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Gerbangkertosusila.
4. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Pertumbuhan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Gerbangkertosusila.

5. Untuk mengetahui Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan di wilayah Gerbangkertosusila secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Akademis**

1. Bagi Universitas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan bagi civitas akademika khususnya ilmu akuntansi dalam pelaporan keuangan daerah.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan informasi mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta sebagai alat untuk menguji kemampuan melakukan penelitian, baik yang relevan dengan topik penelitian maupun yang tidak terkait.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini akan memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat atas kebijakan ekonomi daerah khususnya kinerja keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Gerbangkertosusila untuk periode selanjutnya.